

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit.....	5
Bagan I Pembagian Wilayah	17
Bagan II Kekuasaan Pemerintah	17
Bagan III Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi	18
Bagan IV Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18
Bagan V Tugas Kepala Daerah	19
Bagan VI Wewenang Kepala Daerah	19
Bagan VII Tugas Wakil Kepala Daerah	20
Bagan VIII Tugas dan Wewenang DPRD	21
Bagan IX Hak DPRD	22
Bagan X Asas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	22
Bagan XI Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	23
Bagan XII Urusan Pemerintahan	24
Bagan XIII Penataan Daerah	26
Bagan XIV Sumber Keuangan Daerah	28
Bagan XV APBD	30
Bagan XVI Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	31
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	32
Bab I KETENTUAN UMUM	34
Bab II PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA	39
Bab III KEKUASAAN PEMERINTAHAN	40
Bab IV URUSAN PEMERINTAHAN	42
a. Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan	42
b. Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut	42

DAFTAR ISI

c.	Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren	43
d.	Bagian Keempat Urusan Pemerintahan Umum.....	52
e.	Bagian Kelima Forkopimda	54
 Bab V KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN		
	DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN	55
a.	Bagian Kesatu, Kewenangan Daerah Provinsi di Laut.....	55
b.	Bagian Kedua, Daerah Provinsi yang Bercirikan Kepulauan	56
 Bab VI PENATAAN DAERAH		
a.	Bagian Kesatu Umum	58
b.	Bagian Kedua Pembentukan Daerah	58
1.	Paragraf 1 Pemekaran Daerah	59
2.	Paragraf 2 Penggabungan Daerah	66
c.	Bagian Ketiga Penyesuaian Daerah	69
d.	Bagian Keempat Kepentingan Strategis Nasional	70
1.	Paragraf 1 Pembentukan Daerah	70
2.	Paragraf 2 Penyesuaian Daerah.....	72
e.	Bagian Kelima Desain Besar Penataan Daerah	73
 Bab VII PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH		
a.	Bagian Kesatu Umum	73
b.	Bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	74
c.	Bagian Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74
1.	Paragraf 1 Kepala Daerah	74
2.	Paragraf 2 Wakil Kepala Daerah	75
3.	Paragraf 3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	77
4.	Paragraf 4 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	85
5.	Paragraf 5 Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	87

6.	Paragraf 6 Tindakan Penyidikan	97
7.	Paragraf 7 Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	98
d.	Bagian Keempat DPRD Provinsi	101
1.	Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan	101
2.	Paragraf 2 Fungsi	102
3.	Paragraf 3 Tugas dan Wewenang	104
4.	Paragraf 4 Keanggotaan	106
5.	Paragraf 5 Hak DPRD Provinsi	108
6.	Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Anggota	109
7.	Paragraf 7 Fraksi	110
8.	Paragraf 8 Alat dan Kelengkapan DPRD Provinsi ..	111
9.	Paragraf 9 Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi	114
10.	Paragraf 10 Pelaksanaan Hak Anggota	117
11.	Paragraf 11 Persidangan dan Pengambilan Keputusan	118
12.	Paragraf 12 Tata Tertib dan Kode Etik	121
13.	Paragraf 13 Larangan dan Sanksi	122
14.	Paragraf 14 Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara	123
e.	Bagian Kelima DPRD Kabupaten/Kota	129
1.	Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan	129
2.	Paragraf 2 Fungsi	129
3.	Paragraf 3 Tugas dan Wewenang	131
4.	Paragraf 4 Keanggotaan	134
5.	Paragraf 5 Hak DPRD Kabupaten/Kota	136
6.	Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Anggota	137
7.	Paragraf 7 Fraksi	138
8.	Paragraf 8 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota	139
9.	Paragraf 9 Pelaksanaan Hak DPRD Kabupaten/Kota	142

DAFTAR ISI

10. Paragraf 10 Pelaksanaan Hak Anggota	145
11. Paragraf 11 Persidangan dan Pengambilan Keputusan	147
12. Paragraf 12 Tata Tertib dan Kode Etik	149
13. Paragraf 13 Larangan dan Sanksi	150
14. Paragraf 14 Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara	152
f. Bagian Keenam Sistem Pendukung DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	158
1. Paragraf 1 Sistem Pendukung DPRD Provinsi	158
2. Paragraf 2 Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota	159
g. Bagian Ketujuh Hubungan Kerja antara DPRD dan Kepala Daerah	160
Bab VIII PERANGKAT DAERAH	161
a. Bagian Kesatu Umum	161
b. Bagian Kedua Perangkat Daerah	161
1. Paragraf 1 Umum	161
2. Paragraf 2 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	162
3. Paragraf 3 Sekretariat Daerah	163
4. Paragraf 4 Sekretariat DPRD	164
5. Paragraf 5 Inspektorat	165
6. Paragraf 6 Dinas	165
7. Paragraf 7 Badan	166
8. Paragraf 8 Kecamatan	167
Bab IX PERDA DAN PERKADA	174
a. Bagian Kesatu Perda	174
1. Paragraf 1 Umum	174
2. Paragraf 2 Perencanaan	176
3. Paragraf 3 Penyusunan	177
4. Paragraf 4 Pembahasan	178

DAFTAR ISI

5.	Paragraf 5 Penetapan	178
6.	Paragraf 6 Pengundangan	180
7.	Paragraf 7 Evaluasi Rancangan Perda	180
a.	Bagian Kedua Perkada	
1.	Paragraf 1 Umum	181
2.	Paragraf 2 Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan	182
3.	Paragraf 3 Pengundangan	182
b.	Bagian Ketiga Pembatalan Perda dan Perkada	182
c.	Bagian Keempat Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda	185
d.	Bagian Kelima Penegakan Perda dan Perkada	187
1.	Paragraf 1 Satuan Polisi Pamong Praja	187
2.	Paragraf 2 Pejabat Penyidik	188
Bab X	PEMBANGUNAN DAERAH	189
a.	Bagian Kesatu Umum	189
b.	Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah	190
c.	Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD	193
d.	Bagian Keempat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.....	197
e.	Bagian Kelima Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	198
Bab XI	KEUANGAN DAERAH	198
a.	Bagian Kesatu Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	198
b.	Bagian Kedua Hubungan Keuangan Antar-Daerah	200
c.	Bagian Ketiga Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	200
d.	Bagian Keempat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	201
e.	Bagian Kelima Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	202

DAFTAR ISI

1.	Paragraf 1 Pendapatan	202
2.	Paragraf 2 Belanja	209
3.	Paragraf 3 Pembiayaan.....	210
4.	Paragraf 4 Pengelolaan Barang Milik Daerah	213
5.	Paragraf 5 APBD	214
6.	Paragraf 6 Perubahan APBD	220
7.	Paragraf 7 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	221
8.	Paragraf 8 Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	225
9.	Paragraf 9 Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah	228
Bab XII	BUMD	230
a.	Bagian Kesatu Umum	230
b.	Bagian Kedua Perusahaan Umum Daerah	232
c.	Bagian Ketiga Perusahaan Perseroan Daerah.....	233
d.	Bagian Keempat Pengelolaan BUMD	234
Bab XIII	PELAYANAN PUBLIK	235
a.	Bagian Kesatu Asas Penyelenggaraan.....	235
b.	Bagian Kedua Manajemen Pelayanan Publik	236
Bab XIV	PARTISIPASI MASYARAKAT	240
Bab XV	PERKOTAAN	242
a.	Bagian Kesatu Umum	242
Bab XVI	KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	244
a.	Bagian Kesatu Kawasan Khusus.....	244
b.	Bagian Kedua Kawasan Perbatasan Negara.....	245
Bab XVII	KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN	246
a.	Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah.....	246
1.	Paragraf 1 Kerja Sama Wajib	247
2.	Paragraf 2 Kerja Sama Sukarela.....	248

DAFTAR ISI

3. Paragraf 3 Pelaksanaan Kerja Sama.....	249
4. Paragraf 4 Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama	250
b. Bagian Kedua Perselisihan	251
Bab XVIII DESA	251
Bab XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	252
a. Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	252
1. Paragraf 1 Umum	252
2. Paragraf 2 Pembinaan Terhadap Penyeleng- garaan Pemerintahan Daerah Provinsi	253
3. Paragraf 3 Pembinaan Terhadap Penyeleng- garaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ...	254
4. Paragraf 4 Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan	255
5. Paragraf 5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	256
6. Paragraf 6 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	256
b. Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah	257
c. Bagian Ketiga Penghargaan dan Fasilitasi Khusus	257
BAB XX TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH	259
BAB XXI INOVASI DAERAH	260
BAB XXII INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	262
BAB XXIII DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH	264
BAB XXIV KETENTUAN PIDANA	265
BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN	266
BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN	266

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP	267
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	271
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	385
I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....	385
a. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	385
b. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	387
c. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	390
d. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	392
e. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	394
f. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	395
g. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	397
h. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak....	400
i. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	403
j. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	405
k. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	406
l. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	408

m.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	409
n.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	410
o.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	412
p.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	417
q.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	418
r.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	419
s.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	421
t.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	422
u.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	422
v.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	423
w.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	424
x.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	425
y.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	428
z.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	430
Aa.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ...	431
Bb.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	433
Cc.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	435
Dd.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	439

Ee. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	442
Ff. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	443

II. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN KONKUREN	443
-----------------------------	-----

LAMPIRAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang	447
--	-----

LAMPIRAN:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	453
---	-----

LAMPIRAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	458
--	-----